



PERUBAHAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2026





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

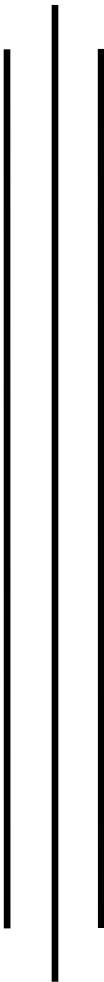
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2026
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM**



Disusun Oleh
Sekretariat Daerah Kota Batam
Bagian Perencanaan dan Keuangan

**PEMERINTAH KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 24 Agustus 2026
Sekretaris Daerah Kota Batam



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN	
TRIWULAN II TAHUN 2026	5
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan	
Triwulan II Tahun 2026.....	5
2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja	
hasil/keluaran yang direncanakan	5
2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja	
hasil/keluaran yang direncanakan	7
2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja	
hasil/keluaran yang direncanakan	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	
Daerah	21
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	25
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Catatan Penting.....	47
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	47
4.3 Rencana Tindak Lanjut	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II 10

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II 21

Tabel 2. 3 Pencapaian Indikator Kerja Kunci Tahun 2026 s/d Triwulan II.. 21

Tabel 3. 1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.....29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka Sekretariat Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026 setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1623);
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Berita Daerah Nomor 1721)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, masih terdapat beberapa program/kegiatan dan subkegiatan yang realisasinya belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung pada semester berikutnya, serta beberapa keluaran yang pelaksanaannya belum mencapai target sampai dengan Triwulan II.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, khususnya Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, khususnya Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target 35 orang dan realisasi 11 orang atau sebesar 31,4%.
 - **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, khususnya Subkegiatan Pengadaan Mabel dengan realisasi 11 unit dari target 162 unit atau sebesar 6,7%, serta

Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi 39 unit dari target 98 unit atau sebesar 39%.

- **Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, khususnya Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi.
- **Kegiatan Penataan Organisasi**, pada Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang masing-masing belum terealisasi sampai dengan Triwulan II.
- **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**
 - **Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**, khususnya Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan yang belum terealisasi sampai dengan Triwulan II.
 - **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**, antara lain Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan realisasi 2 dokumen dari target 24 dokumen atau sebesar 8,3%; Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial sebesar 20%; serta Subkegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga sebesar 25,8%.
 - **Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**, khususnya Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan realisasi 70 dokumen dari target 410 dokumen atau sebesar 17%, serta Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum sebesar 28%.
 - **Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**, khususnya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama yang sampai dengan Triwulan II belum terealisasi.
- **Program Perekonomian dan Pembangunan**
 - **Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**, khususnya Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan yang belum terealisasi, serta Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan realisasi 1 dokumen dari target 4 laporan atau sebesar 12,5%.

- **Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**, khususnya Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan realisasi 83 dokumen dari target 280 dokumen atau sebesar 29,6%.
- **Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**, khususnya subkegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; pertambangan dan lingkungan hidup; serta energi dan air, yang masing-masing baru terealisasi 2 dokumen dari target 5 dokumen atau sebesar 40%.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan capaian pelayanan administrasi keuangan sebesar 50%.
 - **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan capaian pemenuhan pelayanan umum perkantoran sebesar 50%.
 - **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan capaian sebesar 50%.
 - **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan capaian sebesar 50%.
 - **Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, dengan capaian sebesar 50%.
 - **Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**, dengan capaian sebesar 50%.
- **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**
 - **Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**, pada Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan realisasi 8 kasus dari target 13 kasus atau sebesar 61,5%, sehingga pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan target periode.

- **Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**, pada Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan realisasi 22 dokumen dari target 32 dokumen atau sebesar 68,75%.

- **Program Perekonomian dan Pembangunan**

- **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**, yang secara kegiatan telah mencapai 50%.
- Beberapa subkegiatan di dalamnya, yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD; Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil; serta Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD, masing-masing telah mencapai 50%.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Selain kegiatan yang belum dan telah memenuhi target, terdapat beberapa program/kegiatan yang realisasinya telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II. Capaian tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan tahapan target yang telah ditetapkan.

- **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

- **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** pada indikator Persentase Pencapaian SPM Kota Batam telah mencapai 97,47 dibandingkan target 94,5, sehingga capaian telah melampaui target yang ditetapkan.
- **Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**, dengan capaian kegiatan sebesar 32,67% dibandingkan target periode sebesar 25%, sehingga realisasinya telah melampaui target.
- **Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**, dengan realisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen atau sebesar 100%.
- **Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana** belum termasuk kategori ini karena belum terealisasi.

- **Program Perekonomian dan Pembangunan**
 - **Program Perekonomian dan Pembangunan** pada indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa mencapai 88,80 dibandingkan target 86, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan.
 - **Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**, pada Subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa telah mencapai 131 dokumen dari target 170 dokumen atau sebesar 87%, sedangkan Subkegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa telah mencapai 384 orang dari target 450 orang atau sebesar 85,3%.

Tabel 2. 1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2026 s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	90.29	90.25	-
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.11	-	-
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Dan Evaluasi Yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan Dan Waktu Perencanaan	100%	50%	50%
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	3 Laporan	1 Dokumen	33.%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	50%	50%
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/ Bulan	308 Orang/Bulan	50%
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6 Dokumen	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2026 s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	50%	50%
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	11 Orang	31.4%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	50%	50%
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	50%
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	50%
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	50%
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjnagn Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	50%	50%
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	8 Unit	61.5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2026 s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mabel yang Disediakan	76 Unit	11 Unit	6.7%
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Lainnya	98 Unit	39 Unit	39%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	100%	50%	50%
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	50%	50%
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	50%
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	121 Unit	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2026 s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	825 Unit	285 Unit	50%
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di Pelihara	10 Unit	10 Unit	50%
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	50%	50%
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daereah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	50%
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	0 Orang	50%
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/Bulan	50%
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	50%	50%
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang di sediakan	7 Paket	4 Paket	57.14%
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	7 Paket	4 Paket	57.14%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2026 s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi	46.5	46	98.9%
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	0 Laporan	0%
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Tata Lakasana	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	50%	50%
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	25 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2026 s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	18 Laporan	50%
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	0 Laporan	0%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pencapaian SPM Kota Batam	94.5	97.47	97.47
		Persentase Cakupan Lembaga Keagamaan dan Tokoh Keagamaan yang diberikan Layanan Sesuai Kebutuhan	89.94%	25%	25%
		Persentase Produk Hukum yang di Implementatif	100%	25%	25%
		Persentase MoU yang di tindaklanjuti	100%	25%	25%
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	25%	32.67%
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2026 s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	66.6%
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan Lembaga Keagamaan dan Tokoh Keagamaan yang diberikan Layanan Sesuai Kebutuhan	100%	-	-
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	24 Dokumen	2 Dokumen	8.3%
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	40 Dokumen	20%
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	7 Dokumen	50%
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	900 Keluarga	483 Keluarga	25.8%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2026 s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasikan	100%	50%	50%
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	410 Dokumen	70 Dokumen	17%
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	8 Kasus	61.5%
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	410 Dokumen	115 Dokumen	28%
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama yang di Capai	100%	25%	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	32 Dokumen	22 Dokumen	68.75%
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	0 Laporan	0%
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian	100%	50%	50%
		Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas	95%	95%	95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2026 s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	86	88.80	88.80
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang di Sediakan	100%	25%	25%
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian Daerah yang di Tindaklanjuti	100%	50%	50%
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	2 Laporan	50%
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang di keluarkan	96.5	-	-
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Dasilitasi Penyusnan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2026 s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	0 Dokumen	0%
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	1 Dokumen	12.5%
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	89	-	-
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	131 Dokumen	87%
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	280 Dokumen	83 Dokumen	29.6%
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang da Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	384 Orang	85.3%
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	50%	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2026 s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustria, KUKM, Penanaman Modal, Tenga Kerja	5 Dokumen	2 Dokumen	40%
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo Perhubungan Statistik, Persandian	5 Dokumen	2 Dokumen	40%
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	5 Dokumen	2 Dokumen	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	90	Angka	86.10	
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	84	Poin	55.50	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	7.5%	Persentase	6.76	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam	Point	80	Point	90.25	

Tabel 2. 3 Pencapaian Indikator Kerja Kunci Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	22	Poin	27.05	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	20.5	Poin	21.75	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	Poin	40	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan serta dinamika pembangunan di Kota Batam, dapat diidentifikasi beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam. Isu-isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga dengan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya aparatur, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta dukungan terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinatif dan fasilitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Batam perlu memastikan agar pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu-isu penting yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan terhadap SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Perkembangan Kota Batam sebagai daerah dengan aktivitas pemerintahan, ekonomi, investasi, dan pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara. Sekretariat Daerah perlu mendorong penguatan kapasitas SDM aparatur melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesionalisme, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas.

Selain kompetensi teknis, aparatur juga dituntut memiliki kemampuan dalam koordinasi, analisis kebijakan, pengelolaan kinerja, pelayanan publik, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu isu penting agar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat semakin efektif, profesional, dan berorientasi pada hasil.

2. Perlunya penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Pertumbuhan Kota Batam sebagai kawasan strategis dan salah satu pusat kegiatan ekonomi memerlukan dukungan infrastruktur pemerintahan yang memadai. Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, penguatan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga sarana dan prasarana

pendukung penyelenggaraan pemerintahan, teknologi informasi, sistem informasi, serta pengelolaan barang milik daerah.

Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap perangkat daerah agar dukungan sarana dan prasarana pemerintahan dapat dikelola secara efektif, efisien, tertib, dan akuntabel. Penguatan sistem informasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta mempercepat penyediaan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan.

3. Mendorong terciptanya Kota Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional

Sebagai daerah yang memiliki posisi strategis dan potensi besar dalam perdagangan, industri, investasi, pariwisata, serta konektivitas regional dan internasional, Kota Batam memiliki peluang untuk terus berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang mampu mendukung terciptanya iklim pembangunan dan investasi yang kondusif.

Dalam hal ini, Sekretariat Daerah berperan penting dalam memastikan terwujudnya koordinasi lintas perangkat daerah, sinkronisasi kebijakan, fasilitasi pelaksanaan program prioritas, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Penguatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah menjadi penting agar berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki Kota Batam dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, isu-isu tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam perlu diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis kinerja. Hal tersebut didukung melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan serta monitoring dan evaluasi, dan pengelolaan sumber daya daerah secara efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel. Dengan demikian, Sekretariat Daerah dapat semakin optimal dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan Kota Batam.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran).

Sekretariat Daerah Kota Batam, total pagu mengalami perubahan dari Rp270.810.337.027,00 menjadi Rp278.219.340.421,00, atau bertambah sebesar Rp. 2.181.291.544,00. Perubahan tersebut terjadi pada beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan, baik berupa penambahan maupun pengurangan anggaran, dalam rangka menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2026, yaitu sebagai berikut;

Perubahan anggaran pada **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** mengalami penambahan sebesar Rp 4.938.085.150,00 dari pagu awal Rp136.874.314.750,00 menjadi Rp141.812.399.900,00. Penambahan tersebut terutama terdapat pada **subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial** bertambah Rp740.000.000,00 untuk mendukung kenaikan bantuan hibah pada pelaksanaan Safari Ramadhan dan kunjungan kepada calon penerima. Subkegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat juga bertambah Rp1.030.923.000,00, terutama untuk menyesuaikan peningkatan kebutuhan insentif Fardhu Kifayah serta penambahan konsumsi.

Pada **Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp538.598.000,00. Penambahan tersebut terutama digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, termasuk peningkatan kebutuhan honorarium beracara dan biaya perkara. Honorarium beracara semula dialokasikan sebesar Rp360.000.000,00 menjadi Rp936.000.000,00, sedangkan biaya perkara meningkat dari Rp40.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00, sejalan dengan perkembangan jumlah kasus yang ditangani.

Selanjutnya, **Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah** mengalami penambahan sebesar Rp1.773.362.000,00, yang seluruhnya terdapat pada

subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. Penambahan ini diperlukan untuk mendukung prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa hinterland berupa pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan bantuan biaya hidup mahasiswa.

Pada **Program Perekonomian dan Pembangunan**, terjadi penambahan pagu sebesar Rp289.626.700,00. Perubahan terutama terdapat pada **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**, dengan penambahan Rp93.250.100,00 pada subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Penambahan ini diperlukan dalam rangka menekan inflasi *year on year* Kota Batam yang mengalami peningkatan sejak Februari 2026, antara lain melalui pelaksanaan Operasi Pasar Murah.

Sementara itu, Kegiatan **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** mengalami perubahan berupa pengurangan bersih sebesar Rp28.684.900,00. Perubahan tersebut terdiri dari pengurangan pada **subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan** sebesar Rp60.720.000,00, namun terdapat penambahan pada **subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan** sebesar Rp27.778.000,00 serta **Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan** sebesar Rp4.257.100,00.

Pada **Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**, pagu mengalami penambahan sebesar Rp232.347.500,00. Penambahan tersebut meliputi subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp41.506.000,00 untuk kebutuhan pendampingan/advisor dari LKPP pada paket pekerjaan *Multiyears* Gedung Beringin dan Gedung Bersama. **Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik** sebesar Rp87.208.500,00 untuk kebutuhan lisensi *firewall*; serta **Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa** sebesar Rp103.633.000,00 untuk mendukung pendampingan konsolidasi *e-purchasing*.

Pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan** Daerah Kabupaten/Kota, perubahan anggaran terjadi pada sejumlah kegiatan. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** mengalami penambahan sebesar Rp 154.242.100,00, yang terdiri atas penambahan pada penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar Rp75.790.400,00 dan **evaluasi kinerja perangkat daerah** sebesar Rp78.451.700,00.

Pada **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, terjadi penambahan sebesar Rp5.857.984.384,00 seluruhnya berasal dari **subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**. Perubahan ini menyesuaikan kebutuhan penganggaran gaji dan tunjangan ASN pada Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mengalami penambahan sebesar Rp309.221.200,00 seluruhnya pada **subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**. Penambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan.

Selanjutnya, **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** mengalami penambahan sebesar Rp2.838.323.099,00. Penambahan terbesar terdapat pada **subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** sebesar Rp2.725.324.999,00, yang diperlukan karena adanya peningkatan kebutuhan perjalanan dinas yang tidak dapat diprediksi dan sangat bergantung pada agenda maupun undangan kegiatan. Selain itu, terdapat penambahan pada **penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor** serta **barang cetakan dan penggandaan** untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran.

Pada **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, terdapat pengurangan sebesar Rp2.758.429.100,00. Perubahan terutama berupa penambahan anggaran untuk **pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan** sebesar Rp4.078.118.000,00, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 6 unit kendaraan dinas (Mobil Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kota Batam) selain itu, **pengadaan mebel** bertambah Rp1.197.664.000,00 untuk melengkapi sarana kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif dan fungsional

Pada **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, terdapat pengurangan sebesar Rp1.620.347.984,00. Pengurangan terutama terjadi pada **penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik** sebesar Rp27.750.600,00 serta **penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor** sebesar Rp21.105.000,00.

Sementara itu, **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** mengalami pengurangan sebesar Rp952.654.819,00. Pengurangan terbesar terdapat pada **pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan** sebesar Rp1.220.132.550,00. Di sisi lain, terdapat penambahan Rp5.492.731,00 pada **subkegiatan**

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang diperlukan untuk pemeliharaan tembok alun-alun serta perbaikan fasilitas toilet Gedung Bersama guna menjaga kelayakan dan kenyamanan fasilitas publik.

Selain itu, **Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** mengalami pengurangan sebesar Rp857.865.076,00, yang seluruhnya berasal dari **subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**. Sementara subkegiatan lainnya tidak mengalami perubahan anggaran.

Pada **Kegiatan Penataan Organisasi**, terdapat pengurangan sebesar Rp68.832.500,00.

Terakhir, **Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** mengalami penambahan sebesar Rp304.270.100,00, seluruhnya pada **subkegiatan Fasilitas Keprotokolan**. Penambahan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan plakat/cendera mata dalam rangka mendukung kegiatan pimpinan pada berbagai acara resmi maupun kunjungan kerja, dengan peningkatan kebutuhan dari 175 pcs menjadi 275 pcs.

Perubahan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, prioritas pemerintah daerah, perubahan kondisi dan kebutuhan operasional, serta hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026. Perubahan anggaran diharapkan dapat memastikan ketersediaan dukungan pendanaan yang lebih tepat sasaran sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal.

Tabel 3. 1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	SEKRETRAIAT DAERAH						270.810.337.027	278.219.340.421		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	90.29	90.32	131.671.706.677	133.852.998.221	2.181.291.544	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.11	75.21				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Dan Evaluasi Yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan Dan Waktu Perencanaan	Persentase Dokumen Penganggaran Dan Evaluasi Yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan Dan Waktu Perencanaan	100%	100%	216.966.700	371.208.800	154.242.100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	125.664.000	201.454.400	75.790.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	91.302.700	169.754.400	78.451.700	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang menerima Layanan Administrasi Keuangan	Persentase Pegawai yang menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	55.282.197.367	61.140.181.751	5.857.984.384	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/Bulan	308 orang/Bulan	55.053.657.367	60.940.741.751	5.887.084.384	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Laporan	228.540.000	199.440.000	-29.100.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	178.676.000	487.897.200	309.221.200	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	35 Orang	178.676.000	487.897.200,00	309.221.200	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	14.951.412.500	16.932.242.639	1.980.830.139	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	2.552.382.700	3.168.932.500	616.549.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	6.016.467.800	5.822.121.540	-194.346.260	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	727.527.000	747.527.000	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.655.035.000	7.193.661.599	1.538.626.599	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	100%	11.045.185.200	8.190.785.000	-2.854.400.200	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	8 Unit	0 Unit	8.404.570.000	0	-8.404.570.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Mabel yang Disediakan	Jumlah Paket Mabel yang Disediakan	1 Unit	13 Unit	718.252.000	4.796.370.000	4.078.118.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Lainnya yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Lainnya yang disediakan	76 Unit	162 Unit	413.191.400	1.610.855.400	1.197.664.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56 Unit	98 Unit	1.509.171.800	1.783.559.600	274.387.800	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	100%	100%	13.176.420.852	11.556.072.868	-1.620.347.984	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.025.926.600	7.998.176.000	-27.750.600	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.117.526.500	1.096.421.500	-21.105.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.032.967.752	2.461.475.368	-1.571.492.384	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	24.183.398.929	23.230.744.110	-952.654.819	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	351.760.000	385.620.000	33.860.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 unit	127 unit	14.993.511.900	13.773.379.350	-1.220.132.550	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56 Unit	98 Unit	2.057.145.000	2.285.270.000	228.125.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di Pelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di Pelihara	10 Unit	10 Unit	6.780.982.029	6.786.474.760	5.492.731	
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menerima Layanan Administrasi Keuangan	Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	6.524.505.829	5.666.640.753	-857.865.076	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	4.023.100.129	3.165.235.053	-857.865.076	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	8 Orang	28.000.000	28.000.000	0	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2.473.405.700	2.473.405.700	0	
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	4.760.444.500	4.689.288.700	-71.155.800	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang di sediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang di sediakan	7 Paket	8 Paket	2.694.115.500	2.667.423.600	-26.691.900	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	7 Paket	8 Paket	2.066.329.000	2.021.865.100	-44.463.900	
	Kegiatan Penataan Organisasi	Kegiatan Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi	46.5	46.5	822.327.900	753.495.400	-68.832.500	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	4 Dokumen	205.822.000	215.160.000	9.338.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	233.416.000	196.597.900	-36.818.100	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	44 Dokumen	98.034.000	48.388.000	-49.646.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Tata Lakasana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Tata Lakasana	1 Dokumen	1 Dokumen	236.850.900	190.742.500	-46.108.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	48.205.000	102.607.000	54.402.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	530.170.900	834.441.000	304.270.100	
	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	50 Laporan	305.149.400	333.459.500	28.310.100	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	36 Laporan	223.750.000	499.710.000,00	275.960.000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	1.271.500	1.271.500,00	0	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pencapaian SPM Kota Batam	Persentase Pencapaian SPM Kota Batam	94	94	136.874.314.750	141.812.399.900	4.938.085.150	
			Persentase Cakupan Lembaga Keagamaan dan Tokoh Keagamaan yang diberikan Layanan Sesuai Kebutuhan	Persentase Cakupan Lembaga Keagamaan dan Tokoh Keagamaan yang diberikan Layanan Sesuai Kebutuhan	89.91	89.91				
			Persentase Produk Hukum yang di Implementatif	Persentase Produk Hukum yang di Implementatif	100%	100%				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Persentase MoU yang di tindaklanjuti	Persentase MoU yang di tindaklanjuti	100%	100%				
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	100%	4.917.014.050	7.845.322.200	2.928.308.150	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	539.310.000	539.305.200	-4.800	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	103.092.000	103.086.800	-5.200	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.274.612.050	7.202.930.200	2.928.318.150	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan Lembaga Keagamaan dan Tokoh Keagamaan yang diberikan Layanan Sesuai Kebutuhan	Persentase Cakupan Lembaga Keagamaan dan Tokoh Keagamaan yang diberikan Layanan Sesuai Kebutuhan	100%	100%	127.111.176.400	126.809.124.900	-302.051.500	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	24 Dokumen	24 Dokumen	89.495.089.200	87.527.545.200	-1.967.544.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	200 Dokumen	23.766.000.000	24.506.000.000	740.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Parieisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaa, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Parieisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaa, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	14 Dokumen	12.938.087.200	12.832.656.700	-105.430.500	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	900 Keluarga	1872 Keluarga	912.000.000	1.942.923.000	1.030.923.000	
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasikan	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasikan	100%	100%	617.714.800	1.156.312.800	538.598.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	410 Dokumen	410 Dokumen	11.949.900	153.429.900	141.480.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	13 Kasus	602.489.000	999.607.000	397.118.000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	410 Dokumen	410 Dokumen	3.275.900	3.275.900	0	
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama yang di Capai	Persentase Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama yang di Capai	100%	100%	4.228.409.500	6.001.640.000	1.773.230.500	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen	32 Dokumen	4.080.000.000	5.853.362.000	1.773.362.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	42.775.500	42.644.000	-131.500	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	105.634.000	105.634.000	0	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian	100%	100%	2.264.315.600	2.553.942.300	289.626.700	
			Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas	Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas	95%	95%				
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	86	86				
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang di Sediakan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang di Sediakan	100%	100%				
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian Daerah yang di Tindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian Daerah yang di Tindaklanjuti	100%	100%	852.296.900	945.547.000	93.250.100	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	5 Dokumen	85.428.500	24.970.000	-60.458.500	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	491.950.000	645.689.800	153.739.800	
	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	5 Dokumen	94.153.400	94.141.800	-11.600	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	2 Dokumen	2 Dokumen	180.750.000	180.745.400	-4.600	
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang di keluarkan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang di keluarkan	100%	100%	146.869.000	118.184.100	-28.684.900	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Dasilitasi Penyusnan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Dasilitasi Penyusnan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	60.720.000	-	-60.720.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	53.211.000	80.989.000	27.778.000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	32.938.000	37.195.100	4.257.100	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	86	86	1.109.377.700	1.341.725.200	232.347.500	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	170 Dokumen	429.842.000	471.348.000	41.506.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	280 Dokumen	280 Dokumen	586.964.700	674.173.200	87.208.500	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	450 Orang	92.571.000	196.204.000	103.633.000	
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	160.400.000	148.486.000	-11.914.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustria, KUKM, Penanaman Modal, Tenga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustria, KUKM, Penanaman Modal, Tenga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	70.444.000	67.513.000	-2.931.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo Perhubungan Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo Perhubungan Statistik, Persandian	5 Dokumen	5 Dokumen	37.104.000	36.864.000	-240.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	5 Dokumen	5 Dokumen	48.224.000	44.109.000	-4.115.000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait bidang Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD